

BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang:

- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Eombana adalah dengan ditetapkannya indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemeritah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bombana.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusuan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Daerah;
 Negara Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
 Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- 9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
- 2. Bupati adalah Bupati Bombana;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana;
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
- 6. IKU pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Strategis Pemerintah Daerah;
- 7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan sasaran strategis SKPD;
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana;
- 9. Kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dan visi, misi dan

stategis organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan:

10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

BAB II TUJUAN DAN RUANG RINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU SKPD
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menuyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016;
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD pada Tahun 2011-2016;
- (3) IKU pada setiap unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome)

4

b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluar (output) sesuai

Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangan beberapa hal yaitu:

a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas

b. Kebutuhan data statistik pemerintah;

c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

> Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 31 Desember 2015

BUPATI BOMBANA

Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

H. BURHANUDDIN A. HS. NOY.

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2015 NOMOR 52

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR: \$2 TAHUN 2015
TANGGAL: 31 DESEMBER 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2011-2016

		***************************************		D		Reformasi Birokrasi	M. I.		The State of the Application of			Memperospat Pembangunan Infrastruktur	1 2	
	-		; :	Menciptakan Pelayanan Prima dan Good			·		Pemerintah serta membuka isolasi wilayah	Pembangunan Ekonomi dan Memudahkan Pelayanan kepada manyanyan dan dan manyanyan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d	Mendalina		KVaral	
		<u> </u>	efisien dan transparan					Meningkatnya ketersediaan infrastruktur	Without a second of the second	jalan jalan & Jembatan	Meningkathya Kualitas		SASARAM	
KIP	Rasio Penduduk yang " 12 melakukan perekaman e-	Rasio tindak lanjut hasil temuan pemerikaaan BPK	Peningkatan Opini BPK 10 terhadan Laporan Keuangan Daerah	Rasio Pemenuhan 9 kebutuhan formasi PNS Daerah	8 Lama proses perizinan	7 Jumlah sarana informasi dan komunikasi	Rasio luas irigasi 6 Kabupaten dalam kondisi balk	5 Rasio jaringan irigasi terhadap lahan pertanian	Ranko drainase dalam na kondisi baik	3 Rasio jembatan dalam kondisi baik	Rosto panjang jalan 2 ' Kebupeten dalam kondiel beik	Rasio penjang jaringan jalan dalam kondisi balk	INDIKATOR KINERJA	VISI : MEWUJUDKAN BOMBANA SEJ
	Persen	Persen	Opini	Persen	Hari	Media	persen	persen	persen	person	persen	person	RATUAN	KAN BOI
	0	8.19	Disclaimer	85.91	US	0	55	0.41	59.35	42.63	32.84	32.43	KONDISI KINERJA FADA AWAL PERIODE REJIKD	ABANA SEJ
厂	60.92	100	WDP	82.67	4	-	æ	0.45	70.63	57.96	35.01	36.27	2012 Y 1	AHTE
r	75	300	WDp	78.96	ယ	ω,	60.5	0.5	76.93	74.31	41.42	46.09	ROET H	RA (M
	8	100	WTP	75.52	N)	u	65	0.55	76.92	74.73	42.01	57.25	2014	UX XU
	8.8	001	WTP	71.18	-	7	8	0.6	76.93	75.44	62.5	72.19	TARGET KINERJA TAHUN 2012 2013 2014 2018 2016	/T (HA
	8	100	WTP	71.18	1	7	70	0.65	76.93	91.94	75.76	81.58		KOE
. -	8	100	WTP	71.18	in the second	7	770	0.65	76.93	91.94	75.76	81.58	KUREJA PADA AKHIR PERKODIA	AHTERA (MUNAJAH) TAHUN 2011-2016
	Jumiah penduduk yang melakukan perekaman e-KTP X 100% Jumiah keseluruhan penduduk	dumlah temuan yang ditindaklanjuti. X 100% Total temuan BPK	Opini yang dikeluarkan BPK terhadap hasil pemeriksaan	Jumlah formasi PNS yang dibutuhkan X 100% Kebutuhan PNS di SKPD	-	Jumiah media yang digunakan untuk pelayanan publik	Luas irigasi dajam kondisi baik X 100% Total jumlah irigaal Kabupaten	9%	Jumiah drainase dalam kondisi baik X 100% Total drainase yang dibutuhkan D	Jumlah tembatan dalam kondisi baik X 100% Total jembatan di Kabupaten Bombana D	: 1		METODE PERHITUNGAN	016
	Disduk & Capil	Inspektorat	вркар	ВКФ	Kanter Peleymonn Periodosan	Bagian Humas Setda	Dinas PU dan TR	Dinas Pertanian	Dinas PU dan TR	Dinas PU dan TR	Dinas PU dan TR	Dinas PU dan TR	SUMBER DATA	

		_	İ		į									
Kantor Felayanan Perimbun	Banyaknya izin investasi yang dikeluarkan Daerah	1700	1700	1670	836	1150	835	459	lzin	Jumiah izin usabe 24 Investasi Daerah	Meningkatnya Jumlah 9 investor swasta	7 Investasi Swasia		
Disperindagkop	Jumlah Keperasi aktif X 100% Jumlah Koperasi di Kabupaten Bombana		75	75	70	6 5	05	63.50	Persen	. 23 казю корстазі актії		menguntungkan bagi seluruh strata ekonomi		
Disperindagkop	Junish UMKM vang dibing. X 100% Junish UMKM di Kabupaten Bombana	75	75	70	8	50	30	0	Persen	22 Rasio UMKM yang dibina	Meningkatnya UMKM dan	Menciptakan Sistem Perekonomian		
вгя	Jumlah Penduduk di bawah saris kemiskinan X 100% Jumlah keseluruhan keseluruhan penduduk	9.5	9.5	10	11	12	13	14.68	Persen	21 Rasio penduduk di bawah garis kemiskinan				
вря	Pendapatan Daerah Regional Bruto yang dicapal	6 a.d 7	6 a.d 7	6 s.d7	6 a.d 7	7 68.47	6 a.d 7	6	Person	20 Pertumbuhan PDRB per kapita	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	masyarakat yang berimbang		
Dinas Kelautan & Perikanan	Rata- Rata Produksi ikan per tahun	27000	26000	25000	24000	23000	22000	20965	Ton	19 Jumlah produksi ikan per tahun		Menciptakan Sistem		
Disperindagkop	Jumlah kelompok pedagang binaan X 100% Jumlah seluruh kelompok pedagang	30	8	25	28	15	5	0	Persen	18 Rasio kelompok pedagang binaan	6 Perekonomian Daerah		Misi 3 : Fembangunan Ekonomi	H A Common Commo
מאם	Jumlah PNS yang telah mengikuti uji kompetensi dan menduduki jabatan Strukturai	200	200	120	. 6	. 0	0	0	Orang	Jumish PNS yang lulus 17 uli kompetensi yang mendapat promosi jabetan				
ВК⊅	Juniah PNS yang lulus uji kompetensi	215	215	166	ij	٥	0	0	Orang	16 Juniah INS yang lulus uli kompetensi	Meningkatkan jumtah PNS 5 yang mengikuti Ujian Kompetensi	Menjamin kepastian dalam penjenjangan karir serta jabatan		
BKD	Jumlah FNS yang telah mengikuti uji kompetensi	300	181	290	188	0,	0	0	Orang	Jumiah PNS yang 15 mengikuti ujian kompetensi				
			! :: ::											
жо	Jumiah PNS yang telah memiliki Sertifikat Diklat Teknis Fungsional	25	25	20 _	15.	- 10	3	0	Orang	Jumlah PNS yang 14 mengikuti Diklat	profesional	dan profesional promosi jabatan		The state of the s
вко		10	10	6.06	5.38	2.56	0.27	0	Persen	Rasio PNS yang menduduki jabatan ** 13 Struktural pernah Diklat PIM	Menciptakan PNS yang	Mengembangkan Aparat yang kompeten		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
SUMBER DATA	metods perhitungan	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJND	016	TARGET KINERJA TAHUN 12 2013 2014 2015 2	2014	ARGET	201	KONDISI KINERJA FADA AWAL PERIODE RPJMD	SATUAN	Indikator emerja	BABARAN	TUJUAN	MI81	,
							1							•

. .

1

							1					-		
,	MISI	MVDCOL	SASARAN	INDIRATOR KINERJA	SATUAN	TVAN VOVA VOLUMENTA	ARGE	T KUME	TARGET KINERJA TAHUN	MOH	KONDISI			
						RPJND	2012	2013	3 2014	2018	5 2016	. w 2	METODE PERHITUNGAN	DATA
	Mist 4:						1	_	_			OMEGIN		
	Feninghatan Kualitas Sumber Daya	the off sold days a major to a contract of the	Meningkatkan 10 kesejahteraan Pemuka	25 Rasio Pemberian tunjangan guru mengaji	Persen	0	82	8	8	8	98	86	Jumlah Chura Naodi wang dibadi ta da	Bagian Kesra
	Manusia	• kualitas iman dan	agama	Roeto man had be				╁	1		-		Jumlah Seluruh Guru Ngaji di Kebupaten Bombana	Setda
	graduate operation to	the state of the s		26 mam/pendeta	Persen	0	73	-78	83	88	8	96	11	Bagian Kesra
; i		The state of the s	Terlaksananya aram	The control of the co	1172						+		Jumlah Kescluruhan Imam/Pendeta di Kabupaten Bombana	
			kragamaan skala regional	27 Jumlah acara keagamaan	Acara	0	3	*	U	7	9	-		
1		AND THE STATE OF THE PARTY OF T			,				1	1				OCUUR
33 11:			12 Membalknya indeke	28 Angka Mclek Huruf (AMH)	Persen	89.31	£	8	97	8	100	100	Jumish penduduk usia 15 fahun kestas bisa baca mila X 100%. Jumish penduduk usia 15 fahun kestas	Dikpora
		Intelektual		29 Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.12	7.28	7.57	7.86	7.88	و	9	Jumlah tahun belajar 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal	Dikpora
<u>.</u>			13 Meningkathya kuelitas intelektual aparat	30 Rasio PNS berpendidikan S-2	Persen	0,98	1.14	1.82	1.68		2.01		Jumlah PNS vang berrendidikan S.2 X 100% Jumlah PNS di Kabupaten Bombana	BKD
				31 Angka usia harapan										
				31 hidup	Tahun	67.91	68.12	68.52	8	69.5	70	70	Usia harapan hidup rata-rata masyarakat Bombana	Dinkes & KB
				Rasio turunnya 32 Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada balita	Persen	10.5/0.6	10.5/0.	9.5/	9.5/ 0.3	9/0.2	8.5/ 0.1	8/0.1	Jumlah zizi buruk dan zizi kurang pada balita X 100% Jumlah balita di Kabupaten Bombana	Dinkes & KB
	· .			33 Angka kematian bayi	Kelahiran	4	25	σ.	25	•	0	0	Angka kematian beyi / 1000 kelahiran	Dinkes & KB dan
	10	Jasmani dan Rohani	14 Membaiknya indeks kesehatan	34 Menurunnya angka kematian ibu	Kelahiran	299	200	150	100	50	0	ő	Angka kematian ibu / 100.000 kelahiran	Dinkes & KB dan RSUD
	·		Ι ω	35 Rasio Dokter per satuan penduduk	Orang	0.13	0.18	0.2	0.26	0.23	0.32	0.32	Jumish Dokter / 1000 penduduk	Dinkes & KB dan
	:		3	kasso tenaga medis	Orang	1.54	1.76	3.09	3.73	3.18	3.3	10.3	Jumish tenaga medis / 1000 penduduk	Dinkes & KB dan RSUD
			37	kcechatan daar pasien masyarakat miskin	Orang	28.56	30	35	<u>ड</u>	8	70	770	Jumlah masyarakat miskin yang terlayani X 100% Jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Bombana	Dinkes & KB dan RSUD
							L	-				-		

													-
Disbudparekraf	Jumlah situs dan kawasan yang direnarkan X 100% Jumlah keseluruhan situs dan kawasan	36.36	₹ .				18.18	13.64	——		41 Kawasan budaya budaya yang dicelarikan		
Disbudparekraf	The state of the s	,	1								Kelestarian situs dan	masyarakat Bombana	
	Jumlah paguyuban masyarakat lokal	15.3		13 _	ឆ	٥	6	2	Pagayuban	- yang dibina			
					1					Jumiah masumutas latan	A Pembinaan masyarakat	AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED OF THE PERSON	The state of the s
Disbudparekraf	Jumlah keseluruhan gup seni	70	70 -	- 65	- 55 -	8	1 45	8	Persen _	dibina			
				1	1	1	-			30 Jumlah grup seni yang		<u>.</u>	
Disbudparekraf	Jumlah sanggar seni yang terdata	16	. 16	14	12 - 14 16			3		vaudys tradisional	15 kelompok seni/sanggar budaya	lombana In	Masyarakat Bombana
				7	7		_		Kelompok	38 Jumlah kelompok seni/		Merekatkan	Pembangunan
DATA	METODS PERHITUNGAN	PERIODE RPJMD	2016	2015	2012 2013 2014 2015 2016	2 2013	<u> </u>	REJUDE .					Mist 5:
		KINIKA KI	K	TAT AL	TARGET KINERJA TAHUN	TARGE	T	71	KAUTAS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN	KVafaL	Total Parts
		-	_					KONDISI					

BUPATI BOMBANA